



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TORNANDA SYAIFULLAH
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 82476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/250 m2 di KAB / KOTA ---,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/300 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
4. Tanah Seluas 314 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **744.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 2.400.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 375.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV 1.5 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **250.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **666.769.704**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

13.661.169.704

III. HUTANG

Rp.

1.362.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

12.298.669.704

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.